

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian di setiap negara, terutama oleh negara berkembang. Hal ini karena tingkat kemiskinan di negara berkembang lebih tinggi daripada di negara maju, tak terkecuali di negara Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan yang ada di negara berkembang ini ditunjukkan melalui standar hidup yang cenderung rendah dari sebagian besar penduduknya yang merupakan akibat dari pendapatan yang juga rendah.<sup>2</sup>

Bagi pemerintah Indonesia, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan ini dapat dirasakan apabila permasalahan kemiskinan dapat dikurangi atau dapat diatasi. Kesejahteraan umum sendiri merupakan kondisi di mana sisi material, spiritual dan sosial penduduk negara terpenuhi sehingga dapat hidup secara layak serta mampu mengembangkan diri, dengan tujuan agar dapat menjalankan kegiatan sosial maupun ekonomi.

Kemiskinan ialah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs* guna mempertahankan hidup seperti

---

<sup>2</sup> Himawan Yudistira Dama, et.al., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16, No. 3, 2016, hlm. 550

sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Di Indonesia tingkat kemiskinan dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan umum. Bank Dunia juga menyebutkan bahwa bahwa kemiskinan merupakan kekurangan yang diukur menggunakan tingkat kesejahteraan.<sup>3</sup> Karena di antara kemiskinan dan kesejahteraan memiliki hubungan negatif yaitu, apabila tingkat kemiskinan di Indonesia rendah maka penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sebaliknya tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia maka tingkat kesejahteraan penduduknya rendah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang termasuk dalam target pembangunan yang perlu dilakukan evaluasi secara berkala dengan tujuan angka kemiskinan dapat berkurang dan meningkatnya kesejahteraan umum penduduk Indonesia dapat terwujud.

Islam sendiri juga memandang kemiskinan sebagai permasalahan yang harus diatasi, karena tidak jarang kemiskinan menjadikan manusia ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dasar dari masalah kehidupan juga disebabkan dari faktor kemiskinan itu sendiri, karena ketika seseorang ditimpa kemiskinan, baik miskin ekonomi atau spiritual agama yang mendorong seseorang menjadi berani untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh agama maupun negara. Kemiskinan memberikan dampak yang membuat manusia kelaparan, kemudian timbul tindakan kriminal, pencurian, permapokan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta; Absolute Media, 2013), hlm. 9

<sup>4</sup> *Ibid.*

Bentuk respons agama Islam terhadap kemiskinan yaitu melalui pemerataan ekonomi yang adil sebagai berwujudan dari prinsip keadilan yang ada dalam agama Islam. Hal ini ditegaskan oleh Ibn Hazm, sebagaimana dikutip oleh Amien Rais dalam bukunya tentang Tauhid Sosial, mengatakan “terdapat sekelompok yang kaya dan sekelompok yang miskin, maka hal ini menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk melakukan pemerataan sosial ekonomi dengan memberikan hak yang miskin”.<sup>5</sup> Bentuk nyata dari respons ini salah satunya ialah dibangunnya lembaga yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan, seperti lembaga amil zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, juga harus dibarengi dengan sikap dalam diri seseorang melalui etos kerja yang tinggi dan hidup tidak berlebihan.

Dalam pengentasan kemiskinan juga terdapat dua strategi yang perlu diperhatikan. *Pertama*, melindungi kelompok masyarakat dan keluarga dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan. *Kedua*, memberikan pelatihan keterampilan dengan tujuan masyarakat menjadi memiliki kemampuan untuk melakukan usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga terjadinya peningkatan kemiskinan dapat diminimalisir.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia selama ini juga telah melakukan berbagai cara untuk pengentasan kemiskinan melalui program-program yang telah

---

<sup>5</sup> Nurul Neni, “Respon Agama terhadap Kemiskinan: Perspektif Sosiologi”, *Jurnal Sosiologi Agama Islam*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 52

<sup>6</sup> Debrina Vita Ferezagia, “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.1, No.1, 2018, hlm. 2

dibentuk. Program ini dibagi dalam empat kluster. Kluster pertama, penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga melalui program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminana Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Untuk Keluarga Miskin (BSM). Kluster kedua, ditunjukkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kluster ketiga, sebagai pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kluster keempat, program-program pro-rakyat terkait rumah murah, angkutan murah, air bersih, listrik murah dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Kemiskinan di Indonesia mengacu pada jumlah atau populasi berdasarkan BPS, menunjukkan bahwa Pulau Jawa menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 14,75 juta orang, posisi kedua ditempati oleh Sumatera sebesar 6,06 juta orang, posisi ketiga ditempati oleh Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,11 juta orang, posisi keempat ditempati oleh Sulawesi sebesar 2,06 juta orang, posisi kelima ditempati oleh Maluku dan Papua sebesar 1,53 juta orang dan posisi keenam ditempati oleh Kalimantan sebesar 1,06 juta orang.<sup>8</sup> Berikut adalah jumlah penduduk miskin seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa.

---

<sup>7</sup> Shinta Yuniana Pertiwi, "Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, 2014, hlm. 220-221

<sup>8</sup> Mela Arnani, "Angka Kemiskinan Naik, Ini Data Per Provinsi", diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>, pada tanggal 18 November 2021, Pukul 0.43

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020**  
**(Ribu)**

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa 2016-2017					
Nama Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	384,3	389,69	373,12	365,55	480,86
Jawa Barat	4224,32	4168,44	3615,79	3399,16	3920,23
Jawa Tengah	4506,89	4450,72	3892,2	3743,23	3980,9
DI Yogyakarta	494,94	488,53	460,1	448,47	475,72
Jawa Timur	4703,30	4617,01	4332,59	4112,25	4419,10
Banten	658,11	675,04	661,36	654,46	775,99

Sumber: bps.go.id (Data Diolah oleh Penulis tahun 2021)

Dari data yang tertera pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa peringkat pertama menurut jumlah atau populasi penduduk miskin ditempati oleh Provinsi Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Barat, keempat Banten, kelima DI Yogyakarta dan keenam DKI Jakarta. Jumlah kemiskinan yang ada di Jawa Timur memang tertinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa akan tetapi jika ditelaah kembali jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2019 masih mampu mengalami penurunan secara terus menerus dan hanya pada tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memang secara keseluruhan provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Presentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa Tahun**  
**2016-2020 (Persen)**

Presentase Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa					
Nama Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	3,75	3,77	3,57	3,47	4,53

Jawa Barat	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,8	11,41
DI Yogyakarta	13,34	13,02	12,13	11,7	12,28
Jawa Timur	12,05	11,77	10,98	10,37	11,09
Banten	5,42	5,45	5,24	5,09	5,92

Sumber: bps.go.id (Data diolah penulis tahun 2021)

Sedangkan berdasarkan data jumlah presentase penduduk miskin provinsi di Pulau Jawa pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur berada di Posisi ketiga. Presentase kemiskinan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 secara berturut-turut mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah presentase penduduk miskin. Hal ini sama seperti jumlah penduduk miskin berdasarkan populasi, di mana pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Keberhasilan dari pembangunan daerah dapat dilihat melalui salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukurnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila suatu daerah memiliki angka PDRB yang tinggi maka akan besar pula potensi sumber penerimaan dari daerah tersebut. Selain itu, peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan sulit diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi.<sup>9</sup> Data laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 156

**Tabel 1.3**  
**Laju Pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)**

LAJU PERTUMBUHAN PDRB DI PULAU JAWA 2016-2020					
Nama Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
DKI Jakarta	5,87	6,2	6,11	5,82	-2,36
Jawa Barat	5,66	5,33	5,65	5,07	-2,44
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,3	5,4	-2,65
DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,2	6,59	-2,69
Jawa Timur	5,57	5,46	5,47	5,52	-2,39
Banten	5,28	5,75	5,77	5,29	-3,38

Sumber: bps.go.id (Data diolah penulis tahun 2021)

Berdasarkan data dari BPS pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB di Pulau Jawa berfluktuasi dan pada tahun 2020 keseluruhan berada di angka negatif. Pada Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 menuju 2017 mengalami penurunan sebesar 0,11%. Sedangkan dari tahun 2017 mengalami kenaikan sangat tipis yaitu sebesar 0,01% dan kembali naik yang sama tipisnya pada 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 ialah sebesar 0,05%. Kemudian, di tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan tidak mampu tumbuh positif yaitu diangka -2,39.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah di suatu negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan peningkatan terhadap PDRB-nya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PDRB merupakan pertumbuhan dari kegiatan perekonomian yang akan menyebabkan terjadinya

penambahan produksi dari barang dan jasa yang akan berdampak terhadap kemakmuran masyarakat yang akan meningkat<sup>10</sup>

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Ukuran atau untuk melihat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan gini ratio. Angka gini rasio berkisar antara nol dan satu. Apabila gini ratio mendekati angka nol maka menunjukkan kesetaraan sempurna atau rendahnya ketimpangan dan sebaliknya apabila gini ratio mendekati angka satu maka menunjukkan ketidaksetaraan atau adanya ketimpangan yang tinggi.<sup>11</sup>

Menurut Todaro, ketimpangan tidak hanya membawa dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positifnya. Dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim ialah adanya inefisiensi ekonomi, sosial dan solidaritas menjadi lemah. Selain itu, tingginya ketimpangan umumnya dipandang sebagai ketidakadilan. Munculnya masalah ketimpangan berasal dari distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan dampak positifnya yaitu memotivasi daerah lain yang kurang maju untuk mampu bersaing serta meningkatkan

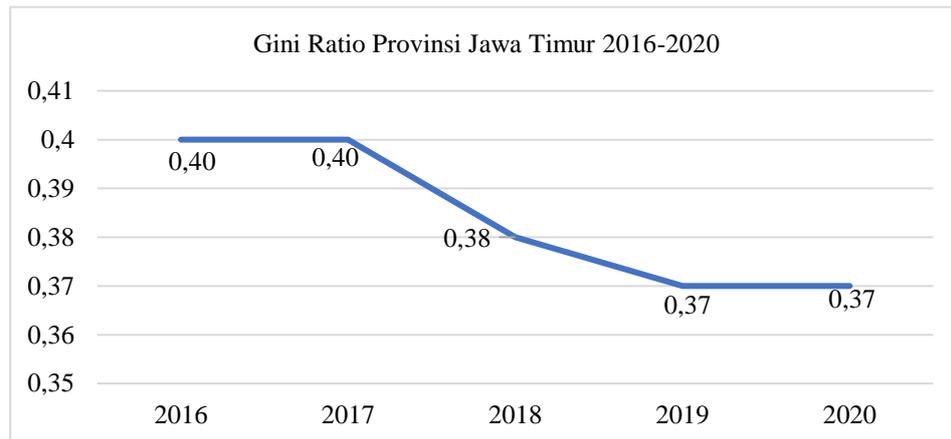
---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Suleman dan Abdurrozzaq Hasibuan, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan", *Jurnal Buletin Utama Teknik*, vol. 17, no. 1. 2021, hlm. 46

<sup>11</sup> Akhsyim, et.al., "Policies to Eliminate Poverty Rate in Indonesia", *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.7, No.1, 2017, hlm.436

pertumbuhan yang bertujuan untuk kesejahteraan yang meningkat. Berikut data gini ratio Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020:

**Grafik 1.1**  
**Gini Ratio Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)**



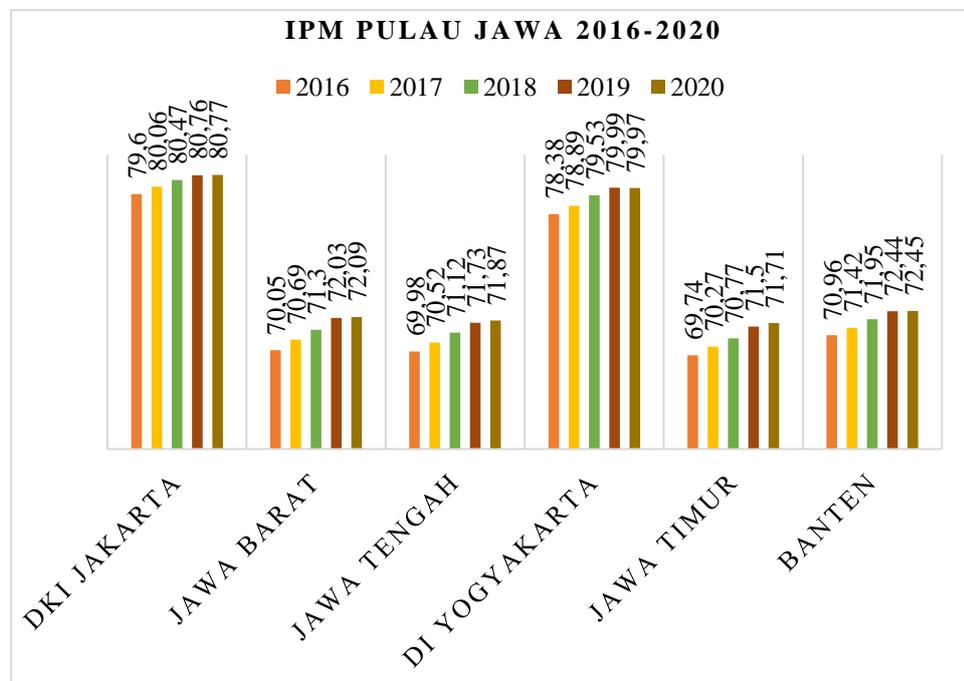
Sumber: bps.go.id (Data diolah oleh penulis tahun 2021)

Berdasarkan data BPS pada grafik 1.1 menunjukkan bahwa gini ratio di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 sampai 2020 semakin mendekati angka 0 meskipun penurunannya sangat sedikit. Selain itu, pada tahun 2016 dan 2017 stagnan di angka 0,40 persen, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi di angka 0,38 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 gini ratio Provinsi Jawa Timur bertahan di angka 0,37 yang artinya berada di posisi sedang.

Kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia juga merupakan indikator lain yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah. Apabila Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah tinggi atau mengalami peningkatan maka diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas

sumber daya manusia yang juga mampu mengalami peningkatan sehingga nantinya akan berdampak pula pada penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Hal ini karena apabila Indeks Pembangunan Manusia rendah maka akan berdampak pada produktivitas kerja masyarakat yang juga rendah dan apabila apabila produktivitas rendah maka juga akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang menjadi rendah, sehingga menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin tinggi di suatu daerah. Berikut presentase Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020:

**Grafik 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2016-2020 (Persen)**



Sumber: bps.go.id (Data diolah oleh penulis.tahun 2021)

Berdasarkan data BPS pada gambar 1.2, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ada di Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan terendah jika dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Pulau Jawa. Tetapi melihat dari grafik di atas, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi di Jawa Timur juga masih mampu untuk terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen, pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen, pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,73 persen dan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen.

Selain Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk juga merupakan faktor penyebab dari kemiskinan. Hal ini karena jumlah penduduk sendiri sering kali dianggap sebagai beban pembangunan, pendapatan perkapita menjadi kecil dan juga menimbulkan masalah pada ketenagakerjaan. Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Apabila angkatan kerja yang banyak ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan maka akan mengakibatkan pengangguran dan menciptakan kemiskinan baru. Oleh karena itu, terdapat pengaruh positif antara jumlah

penduduk dan kemiskinan. Semakin banyak jumlah penduduk maka kemiskinan juga akan semakin tinggi terutama di negara berkembang.<sup>12</sup>

Di sisi lain, penduduk juga dianggap sebagai pemacu pembangunan. Hal ini karena penduduk juga dianggap sebagai pasar yang potensial untuk menjadi sumber permintaan dari barang dan jasa yang selanjutnya berbagai macam kegiatan akan terdorong untuk bergerak. Sehingga skala ekonomi dalam produksi tercipta dan seluruh pihak akan diuntungkan, di mana biaya produksi yang menurun, dapat terciptanya jumlah yang memadai dari sumber pasokan yang murah atau penawaran kerja, kemudian dari waktu ke waktu akan memicu produksi agregat atau output menjadi lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang artinya terjadi penurunan pada angka kemiskinan.<sup>13</sup>

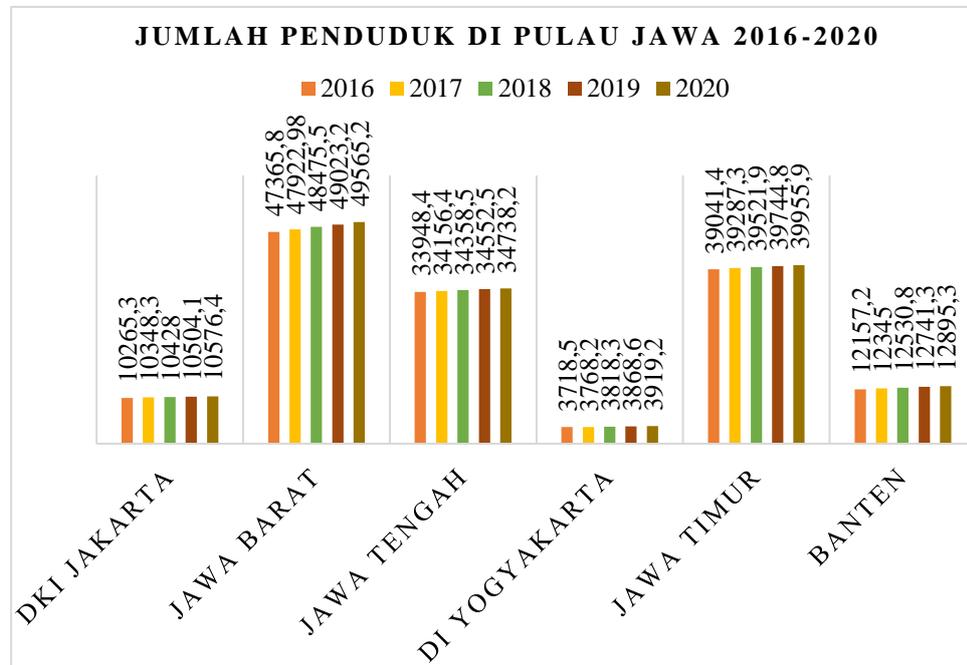
Berikut data jumlah penduduk Provinsi di Pulau Jawa:

---

<sup>12</sup> Rapika Kesatriani Damanik, et.al., “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB terhadap Kemiskinan di Provisini Sumatera Utara”, *Jurnal Darma Agung*, vol. 28, no. 2, 2020, hlm. 359

<sup>13</sup> Sukri Nyompa, et.al., “Analisis Kepadatan Penduduk dengan Tingkat Kemiskinan di Kota Makasar”, *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM-2019*. hlm. 904

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Jawa tahun 2016-2020 (Ribu)**



Sumber: bps.go.id (Data diolah oleh penulis tahun 2021)

Berdasarkan data BPS pada grafik 1.3, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur berada di peringkat kedua untuk jumlah penduduk jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Pulau Jawa. Pada tahun 2016-2020 di mana posisi pertama di duduki oleh Jawa Barat. Selain itu, jumlah penduduk juga mengalami kenaikan setiap tahunnya secara keseluruhan tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, terkait Pertumbuhan Ekonomi serta gini ratio yang cenderung berfluktuasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dan diikuti oleh tingkat kemiskinan yang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan, kemudian di satu tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain itu, dengan jumlah kemiskinan tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa serta pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk yang diberikan terhadap kemiskinan, maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas sebelumnya sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan di Jawa Timur dari empat tahun terakhir mengalami penurunan dan pada satu tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari laju pertumbuhan PDRB lima tahun terkahir cenderung berfluktuasi. Hal tersebut juga diikuti pada Kabupaten/Kota di Provisini Jawa Timur.
3. Gini ratio di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan meskipun di beberapa tahun tertentu mengalami stagnan. Sedangkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dan setiap daerah masing masing berfluktuasi.

4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan terus menerus di lima tahun terakhir. Hal ini juga diikuti oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Jumlah penduduk di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus di lima tahun terakhir. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB, Gini Ratio, perkembangan IPM dan kenaikan jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka beberapa rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh Gini Ratio terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

5. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Gini Ratio terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dilakukannya penelitian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan nilai guna. Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya yaitu:

## 1. Kegunaan Teoretis

Dari adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Ekonomi yang memiliki kaitannya dengan berbagai hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Bagi PemProv Jawa Timur, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

### b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk imbuhan referensi dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para akademisi, baik mahasiswa maupun dosen yang ditambahkan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa atau pengembangan dari segi lokasi, pengembangan variabel yang telah diteliti yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

## **F. Ruang Ligkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas terkait “Pengaruh Pertumbuhan EKonomi, Gini ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan kabuapten/kota di Provinsi Jawa Timur” sehingga dalam penelitian ini terfokus untuk menganalisis terkait pengaruh dari empat variabel bebas yaitu,  $X_1$  (Pertumbuhan Ekonomi)  $X_2$  (Gini ratio),  $X_3$  (IPM),  $X_4$  (Jumlah Peduduk) dengan variabel terikatnya (Y), yaitu kemiskinan

### 2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan batasan pada penelitian ini. Batasan pada penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini menggunakan objek yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
- b. Penelitian ini dengan periode yang diamati dari data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.
- c. Penelitian ini dibatasi dengan variabel bebas  $X_1$  (Pertumbuhan Ekonomi),  $X_2$  (GR),  $X_3$  (IPM),  $X_4$  (Jumlah Penduduk), dan variabel terikat yaitu Y (Kemiskinan).

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan.<sup>14</sup> Pada dasarnya kemiskinan merupakan kondisi dari seseorang atau sekelompok orang yang jumlah pendapatannya belum dapat memenuhi kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok minimum tersebut meliputi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan. Kekurangan tersebut selanjutnya menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersebut belum dapat hidup secara layak sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan produksi riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang dan jasa, dalam periode tertentu. Oleh karena itu pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun tertentu ke tahun berikutnya, untuk menghindari kenaikan harga dalam penghitungan, maka data dapat digunakan sebaiknya adalah Produk Domestik Regional Bruto

---

<sup>14</sup> Debrina Vita Ferezagia, “Analisis Tingkat....”, hlm. 2

<sup>15</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan....*, hlm. 173

(PDRB) atas dasar harga konstan dan buka dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku.<sup>16</sup>

c. Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien gini merupakan angka yang menggambarkan ukuran tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan. Angkanya berkisar di antara nol dan satu. Jika nilai dari gini ratio yang baik yaitu mendekati angka nol maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan makin merata atau tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat dari kelompok kaya dan kelompok masyarakat miskin dapat dikatakan rendah (pemerataan sempurna). Sebaliknya, jika angka gini ratio yang berada di angka yang tinggi mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan semakin tidak merata atau terjadi ketimpangan pendapatan di antara masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dan rendah cukup jauh (ketimpangan yang sempurna).<sup>17</sup>

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran dari kombinasi tiga unsur penting kemakmuran masyarakat, yaitu daya beli (pendapatan), pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari atas tiga komponen yaitu:

---

<sup>16</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan* hlm. 156

<sup>17</sup> [Berkas.dpr.go.id](https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf), "Gini ratio", dalam <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf>, diakses tanggal 16 November 2021

1). Tingkat Kesehatan, diukur dengan umur harapan hidup, 2). Tingkat pendidikan, diukur dari presentase melek huruf dan rata-rata lama sekolah, 3). Daya beli, yang diukur dari pengeluaran (konsumsi) perkapita masyarakat.<sup>18</sup> Pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara merupakan negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.<sup>19</sup>

e. Jumlah Penduduk

Menurut Nudirman, penduduk ialah mereka yang tinggal dan menetap di suatu negara. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.<sup>20</sup> Menurut Said jumlah penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari adanya proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah....*, hlm. 166

<sup>19</sup> Sarpina, et.al., "Tendensi Komparasi Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2021, Vol. 16, No.1, 2021, hlm. 28-29

<sup>20</sup> DPR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2006\\_23.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf), diakses tanggal 16 November 2021

<sup>21</sup> Saharuddin Didu dan Deeri Fauzi, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 6, No.1, 2016, hlm. 106

## 2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul dalam penelitian ini yaitu, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, maka secara operasional peneliti memiliki maksud untuk melihat mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari Pertumbuhan Ekonomi, Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan yang ada di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan secara garis besar pada skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian utama

Pada bagian utama ini terdiri dari VI (enam) bab dan dari masing-masing bab mempunyai subbab. Berikut penjelasannya:

Bab I pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) indentifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan masalah, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi.

Bab II landasan teori yang di dalamnya terdiri dari: (a) kajian teoritis, (b) penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, (d) hipotesis penelitian.

Bab III metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel penelitian dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian yang di dalamnya terdiri dari hasil penelitian yang mencakup deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V pembahasan yang di dalamnya terdiri dari: (a) pembahasan hasil penelitian

Bab IV penutup yang di dalamnya terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini terdiri dari: (a) daftar Pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.